

Olahraga Sebagai Instrumen "Soft Power" dan Legitimasi Kekuasaan: Analisis Politik Kebijakan Olahraga Nasional

Yan Indra Siregar¹ Putra Arima² Ririn Idamanta Br Sembiring³ Putri Nadila⁴ Ronald Gunawan Sihotang⁵ Febrindo Gratama Purba⁶ Boy Neza Sembiring⁷ Andriano Gulo⁸ Juner Sinaga⁹ Gabriel B Sinaga¹⁰ Rendi Marselo Surbakti¹¹ Brema Valentino Sebayang¹²
Universitas Negeri Medan, Indonesia¹⁻¹²

Email: yanindra@unimed.ac.id¹ putraarima@unimed.ac.id² ririnsmbb@gmail.com³ pn0849775@gmail.com⁴ gunawansihotang361@gmail.com⁵ febrindopurba@gmail.com⁶ boysembiringk@gmail.com⁷ andrianogulo@gmail.com⁸ junersinaga19@gmail.com⁹ gabrielsng09@gmail.com¹⁰ rendimarselo4@gmail.com¹¹ bremaswbyang2@gmail.com¹²

Abstrak

Olahraga sering kali dipandang sebagai ranah yang netral dan bebas dari kepentingan politik. Namun, dalam perkembangannya, olahraga bertransformasi menjadi instrumen strategis bagi pemegang otoritas untuk memperkuat pengaruh dan posisi tawar mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan olahraga nasional digunakan sebagai instrumen soft power sekaligus alat legitimasi kekuasaan oleh pemerintah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini membedah dinamika politik di balik alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur megah, dan narasi prestasi atletik yang diproduksi oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan di arena olahraga tidak hanya berfungsi mendongkrak nasionalisme, tetapi juga secara efektif digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu krusial, membangun citra positif rezim, dan memperkuat hegemoni politik di tingkat domestik maupun internasional. Kebijakan olahraga nasional pada akhirnya kerap kali menjadi cerminan dari kepentingan elite penguasa untuk mengamankan stabilitas kekuasaan mereka.

Kata Kunci: Kebijakan Olahraga, Soft Power, Legitimasi Kekuasaan, Politik Olahraga, Hegemoni



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Olahraga sering kali dipersepsikan sebagai ranah yang netral, objektif, dan steril dari kepentingan pragmatis. Namun, secara historis dan empiris, arena pertandingan kerap bertransformasi menjadi panggung pertunjukan kekuasaan dan negosiasi ideologi politik. Ketika pemerintah merumuskan kebijakan olahraga nasional—baik melalui alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur megah, maupun target podium atlet—proses tersebut tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi politik elite penguasa. Karakteristik olahraga yang memiliki daya tarik massa (mass appeal) luar biasa lintas kelas sosial menjadikannya instrumen yang sangat efektif bagi pemegang otoritas untuk memproduksi narasi nasionalisme sekaligus mengamankan legitimasi politik mereka (Grix & Carmichael, 2012). Dalam lanskap politik kontemporer, pemanfaatan olahraga sebagai instrumen politik adaptif dapat dianalisis melalui konsep soft power yang dicetuskan oleh Joseph Nye (2004). Melalui pendekatan ini, negara menggunakan keberhasilan prestasi dan diplomasi olahraga untuk memancarkan citra positif, membangun daya pikat budaya, serta meningkatkan posisi tawar geopolitik di kancah internasional tanpa melalui koersif fisik. Sementara di ranah domestik, fenomena ini berkelindan erat dengan teori hegemoni Antonio Gramsci (1971), di mana stabilitas kekuasaan membutuhkan konsensus masyarakat yang dikondisikan secara halus. Kemegahan sirkuit, stadion, atau euforia juara kerap dikomodifikasi oleh pemerintah sebagai "candu visual" yang efektif untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu sosial-ekonomi yang krusial, sekaligus

mengonstruksi impresi bahwa rezim yang sedang berjalan sukses dan layak untuk terus didukung. Meskipun studi mengenai politik olahraga telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur terdahulu cenderung berfokus pada dinamika global seperti fenomena sportswashing atau boikot Olimpiade era Perang Dingin. Penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi struktural antara kebijakan publik olahraga dengan pemeliharaan hegemoni domestik di tingkat nasional masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademik (research gap) tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan olahraga nasional sebagai manifestasi strategi soft power, serta membedah mekanisme yang digunakan oleh pemegang otoritas dalam mengonversi keberhasilan olahraga menjadi alat legitimasi kekuasaan di dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengurai fenomena olahraga sebagai instrumen politik dan legitimasi kekuasaan. Fokus utama dari metode ini adalah memahami secara mendalam makna, kebijakan, dan narasi yang diproduksi oleh pemerintah terkait sektor olahraga nasional. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan literatur (library research). Sumber data tersebut mencakup dokumen regulasi kebijakan olahraga, laporan alokasi anggaran, rilis resmi pemerintah, serta artikel jurnal ilmiah, buku, dan berita media massa yang kredibel dan relevan dengan topik yang dikaji. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang mengacu pada model analisis interaktif. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana seluruh informasi yang telah dikumpulkan dipilah dan difokuskan hanya pada data yang berkaitan langsung dengan instrumen soft power dan strategi legitimasi politik. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), di mana data yang telah disaring disusun secara naratif untuk menggambarkan korelasi antara kebijakan olahraga dan kepentingan elite penguasa. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan-temuan di lapangan dikonfrontasikan dan dibedah menggunakan pisau analisis Teori Soft Power dari Joseph Nye serta Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci guna menghasilkan kesimpulan yang objektif, valid, dan mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kebijakan Olahraga Nasional sebagai Instrumen *Soft Power* Global

Analisis terhadap kebijakan olahraga nasional menunjukkan bahwa sektor ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai fasilitator kesehatan publik atau rekreasi, melainkan telah diintegrasikan ke dalam cetak biru diplomasi publik negara. Mengacu pada konseptualisasi soft power yang digagas oleh Joseph Nye (2004), negara modern secara sadar menginvestasikan sumber daya finansial yang masif untuk membangun daya pikat non-militer melalui prestasi atletik dan penyelenggaraan mega-event olahraga. Dalam konteks ini, keberhasilan seorang atlet berdiri di podium tertinggi atau kesuksesan sebuah negara menjadi tuan rumah kejuaraan dunia dikomodifikasi oleh pemerintah untuk memproyeksikan citra negara yang maju, aman, dan memiliki kapasitas organisasional yang tinggi. Grix dan Houlihan (2014) menyebut fenomena ini sebagai upaya negara untuk menaikkan status geopolitik (prestige) dan mendapatkan daya tawar (bargaining power) di panggung internasional. Kebijakan pengalokasian anggaran yang besar untuk olahraga prestasi (elite sport) sering kali mengabaikan kebutuhan olahraga akar rumput (sport for all), karena elite penguasa lebih mengejar "pengakuan global" yang instan. Melalui narasi keberhasilan yang diproduksi secara terstruktur oleh media dan institusi negara, olahraga bertransformasi menjadi ruang kontestasi simbolis. Di arena inilah negara-negara

menunjukkan dominasi dan tatanan nilainya tanpa harus menyulut konflik fisik, menjadikan medali emas dan kemegahan stadion sebagai indikator baru dari kekuatan dan stabilitas suatu rezim di mata dunia.

Olahraga sebagai Alat Pengalih Perhatian dan Legitimasi Hegemoni Domestik

Dampak politik dari kebijakan olahraga tidak hanya berhenti pada diplomasi luar negeri, melainkan memiliki implikasi yang jauh lebih agresif di ranah politik domestik. Berdasarkan perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci (1971), kelangsungan kekuasaan elite tidak dapat bertahan lama jika hanya mengandalkan koersif fisik aparat keamanan; kekuasaan membutuhkan konsensus atau persetujuan sukarela dari rakyat yang dikondisikan secara halus (*manufactured consent*). Di sinilah kebijakan olahraga populis mengambil peran strategis sebagai instrumen "budaya" yang memproduksi konsensus tersebut. Pembangunan infrastruktur olahraga yang megah—seperti stadion berstandar internasional atau sirkuit balap—sering kali digunakan oleh rezim penguasa sebagai bukti fisik dari "keberhasilan pembangunan," meskipun proyek tersebut terkadang menguras APHN dan mengorbankan sektor pelayanan publik yang lebih mendasar. Secara sosiologis, euforia kemenangan dan rasa nasionalisme yang dipicu oleh pertandingan olahraga bertindak sebagai mekanisme pengalih perhatian (*diversionary mechanism*) publik yang sangat efektif (Black, 2007). Ketika masyarakat tenggelam dalam gelombang kebanggaan kolektif yang emosional, perhatian mereka teralihkan dari isu-isu krusial seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, krisis lingkungan, atau kebijakan politik kontroversial yang sedang disahkan oleh pemerintah. Elite politik secara pragmatis menunggangi momentum ini dengan melakukan glorifikasi terhadap para atlet dan mengasosiasikan diri mereka sebagai aktor di balik kesuksesan tersebut. Proses konversi dari prestasi olahraga menjadi modal politik ini berjalan secara sistematis, menciptakan impresi semu bahwa pemerintahan yang sedang berjalan adalah pemerintahan yang sukses, stabil, dan harmonis. Pada akhirnya, olahraga dalam cengkeraman kekuasaan tidak lagi murni tentang sportivitas, melainkan telah direduksi menjadi alat legitimasi untuk mengamankan status quo dan meredam daya kritis masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa olahraga tidak lagi dapat dipandang sebagai ranah netral yang terisolasi, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen politik yang strategis bagi pemegang otoritas. Di kancah internasional, kebijakan investasi pada prestasi atletik dan penyelenggaraan mega-event olahraga terbukti berfungsi sebagai manifestasi dari strategi *soft power*. Negara memanfaatkan daya pikat budaya dan keberhasilan olahraga ini untuk mengonstruksi citra positif serta meningkatkan posisi tawar geopolitik global tanpa melalui instrumen koersif militer. Sementara itu, di ranah domestik, olahraga direduksi menjadi alat hegemoni dan legitimasi kekuasaan untuk mengamankan status quo elite politik. Melalui pemanfaatan euforia prestasi dan pembangunan infrastruktur megah, pemerintah secara sistematis mengondisikan persetujuan masyarakat secara halus (*manufactured consent*). Fenomena ini sekaligus bertindak sebagai mekanisme pengalih perhatian (*diversionary mechanism*) publik yang efektif dalam meredam daya kritis masyarakat sipil dari isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang krusial. Pada akhirnya, perumusan kebijakan olahraga nasional cenderung mencerminkan kalkulasi pragmatis elite penguasa untuk mengonversi kebanggaan kolektif masyarakat menjadi modal politik demi menjaga stabilitas kekuasaan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Black, D. (2007). The symbolic politics of high-profile international sport: South Africa and the World Cup. *Sport in Society*, 10(2), 261-276.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. London: Lawrence & Wishart.
- Grix, J., & Carmichael, F. (2012). Why do governments invest in elite sport? A London 2012 case study. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 4(1), 73-90.
- Grix, J., & Houlihan, B. (2014). Sports mega-events as part of a nation's soft power strategy: The cases of Germany (2006) and the UK (2012). *British Journal of Politics and International Relations*, 16(4), 572-596.
- Houlihan, B. (1991). *The Government and Politics of Sport*. London: Routledge.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs